

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar dapat disimpulkan :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar adalah salah satu instansi pemerintah yang bertugas mengendalikan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk perikanan baik laut maupun air tawar dan juga pengawasan terhadap kapal asing di daerah provinsi sumatera barat.
2. Cara perolehan aset tetap yang digunakan adalah dengan pembelian tunai, kecuali bangunan diperoleh dengan cara dibangun sendiri dan hibah.
3. Apabila masa manfaat suatu aset telah habis, maka akan di catat pelepasan aset tetap tersebut.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu instansi milik Negara yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan yang memiliki banyak aset tetap untuk kegiatan operasional.
5. Kebijakan sistem akuntansi yang diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan penyusutan aset tetapnya untuk setiap periode akuntansi.
7. Penggantian aset tetap juga dilakukan dengan system *Dropping* (pemberian pusat).

5.2. Saran

Menurut penulis akuntansi aset tetap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Sudah baik dan benar, karena telah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Namun ada beberapa hal yang akan penulis sarankan kepada perusahaan terkait yaitu :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang seharusnya memiliki nilai residu terhadap aset tetapnya, agar perhitungan penyusutannya lebih akurat.
2. Aset tetap yang tidak beroperasi lagi masih memiliki prosedur yang panjang untuk bisa melelangnya. Seharusnya prosedurnya lebih dipermudah agar hasil pelelangan bisa lebih cepat untuk dimanfaatkan.